

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL RELIGIUS UNTUK MEWUJUDKAN KARAKTER PESERTA DIDIK YANG HUMANIS-RELIGIUS

Oleh : Joko Suyatno,S.Ag.

Abstrak

Istilah pendidikan multikultural-religius mengandung dua konsep pendidikan yang dipadukan, yaitu antara pendidikan multikultural dan pendidikan agama. Pendidikan multikultural sebagai basis pendidikan yang menghargai kemajemukan budaya sedangkan pendidikan agama sebagai basis pendidikan yang bersumberkan pada nilai-nilai keagamaan untuk melahirkan manusia-manusia religius. Perpaduan dua konsep pendidikan ini bertujuan untuk dapat membangun sistem pendidikan yang dapat mengintegrasikan dari keduanya atau mengurangi kelemahannya, khususnya untuk mewujudkan karakter peserta didik yang humanis dan religius.

Kata Kunci: Pendidikan Multikultural, Humanis, Religius

PENDAHULUAN

Tahun 1970, futurolog Alvin Toffler meramalkan tiga gelombang peradaban manusia. Gelombang pertama (*first wave*) disebutnya fase pertanian, yang menggambarkan betapa bidang pertanian telah menjadi basis peradaban manusia. Gelombang kedua (*second wave*) disebutnya fase industri, lantaran industri menjadi poros dan sumber pengaruh dan kekuasaan. Gelombang ketiga (*third wave*), disebutnya fase informasi. Toffler pun membuat

semacam prognosis, bahwa "siapa yang menguasai informasi maka ia akan menguasai kehidupan".

Ramalan Toffler telah terbukti pada masa sekarang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi semakin pesat dan menjadi *icon* peradaban era globalisasi. H.A.R Tilaar, mengutip pendapat David Bell, bahwa gelombang globalisasi yang dipacu oleh teknologi informasi telah melahirkan budaya maya (*cyber culture*). Kemajuan teknologi informasi telah membentuk ruang

cyber yang maha luas, suatu *universe* baru, yaitu *universe* yang dibangun melalui komputer dan jaringan komunikasi. Ruang *cyber* yang baru itu merupakan ruang lalu lintas ilmu pengetahuan, gudang rahasia, berbagai ukuran dan indikator, *entertainment*, dan berbagai bentuk pertunjukkan, suara, dan musik yang dipancarkan dengan kecepatan cahaya elektronik, itulah ruang *cyber* yang telah melahirkan budaya maya (*cyber culture*), berupa suatu geografi mental yang dibangun melalui berbagai konsensus dan revolusi, teritori mental yang dipenuhi dengan berbagai data dan kebohongan, yang dipenuhi jutaan suara dan mata yang bisu dan tak tampak, yang keseluruhannya menimbulkan rasa ingin tahu, ingin berbagi mimpi, dan sebagainya.

Hadirnya *cyber universe/cyber culture* akan mendorong terjadinya kontak budaya (*cultural contact*) antara budaya lokal dan budaya asing. Menurut Ki Supriyoko, kontak budaya akan menghasilkan dua kemungkinan, yaitu: *Pertama*, pertemuan antar budaya tanpa membuahkann nilai-nilai baru yang bermakna, disebut *asimilasi*, dan *Kedua*, pertemuan antar budaya yang membuahkann nilai-nilai yang lebih

bermakna, disebut *akulturasi*. Proses asimilasi dan akulturasi hasil kontak budaya pasti terjadi dan keduanya akan memberikan dampak positif dan negatif.

Pendidikan sebagai basis penanaman nilai dan pembudayaan perilaku harus memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dampak positif dan negatif dari arus globalisasi. Karena itu, maka diperlukan sebuah rumusan sistem pendidikan yang dapat memperkuat dan mengembangkan budaya sendiri dan menanamkan nilai-nilai moral spiritual dalam rangka menghadapi perubahan zaman.

Dalam artikel ini mencoba merumuskan bentuk pendidikan multikultural-religius yang didasarkan pada nilai-nilai penghargaan pada kemajemukan budaya dan nilai-nilai spiritual untuk mewujudkan karakter peserta didik yang humanis-religius.

PEMBAHASAN

Pendidikan Multikultural

Gelombang arus globalisasi akan mendorong terjadinya kontak budaya (*cultural contact*) yang semakin bebas. Setiap orang tidak bisa melepaskan dirinya untuk berhubungan dengan negara, budaya, bahasa, etnis, dan agama

lain. Dalam hal ini, pendidikan multikultural harus bisa menjembatani keanekaragaman tersebut. Jangan sampai arus globalisasi akan melahirkan disintegrasi, pertikaian, dan peperangan antar daerah, suku, bahkan negara. Munculnya konflik sering disebabkan karena perbedaan suku/etnis, budaya, agama, dan lain-lain.

Dalam pandangan Muhaemin, paling tidak ada tiga kelompok sudut pandang yang biasa berkembang dalam menyikapi perbedaan identitas kaitannya dengan konflik yang sering muncul:

Pertama, pandangan primordialis. Kelompok ini menganggap, perbedaan-perbedaan yang berasal dari genetika seperti suku, ras (dan juga agama) merupakan sumber utama lahirnya benturan-benturan kepentingan etnis maupun agama. *Kedua*, pandangan kaum instrumentalis. Menurut mereka, suku, agama dan identitas yang lain dianggap sebagai alat yang digunakan individu atau kelompok untuk mengejar tujuan yang lebih besar, baik dalam bentuk materiil maupun non-materiil. Konsepsi ini lebih banyak digunakan oleh politisi dan para elit untuk mendapatkan

dukungan dari kelompok identitas. Dengan meneriakkan "Islam" misalnya, diharapkan semua orang Islam merapatkan barisan untuk mem-*back up* kepentingan politiknya. Oleh karena itu, dalam pandangan kaum instrumentalis, selama setiap orang mau mengalah dari *prefence* yang dikehendaki elit, selama itu pula benturan antar kelompok identitas dapat dihindari bahkan tidak terjadi. *Ketiga*, kaum konstruktivis, yang beranggapan bahwa identitas kelompok tidak bersifat kaku, sebagaimana yang dibayangkan kaum primordialis. Etnisitas, bagi kelompok ini, dapat diolah hingga membentuk jaringan relasi pergaulan sosial. Karenanya, etnisitas merupakan sumber kekayaan hakiki yang dimiliki manusia untuk saling mengenal dan memperkaya budaya. Bagi mereka, persamaan adalah anugrah dan perbedaan adalah berkah. Dalam konteks pendapat yang ketiga, terdapat ruang wacana tentang multikulturalisme dan pendidikan multikultural sebagai sarana membangun toleransi atas keragaman. Wacana ini mulai ramai terdengar di kalangan akademis, praktisi budaya, dan aktifis di awal tahun 2000 di Indonesia.

Mantan Menteri Pendidikan

Nasional, Malik Fajar (2004) pernah mengatakan pentingnya pendidikan multikulturalisme di Indonesia. Menurutnya, pendidikan multikulturalisme perlu ditumbuhkembangkan, karena potensi yang dimiliki Indonesia secara kultural, tradisi, dan lingkungan geografi serta demografis sangat luar biasa. Sejak dulu, Indonesia memang menghargai perbedaan dan keanekaragaman. Sebab, kemerdekaan Indonesia pun tidak lepas dari peran semua lapisan masyarakat Indonesia yang pluralis. Menurut Noeng Muhajir bahwa kita patut bangga terhadap *foundings father* bangsa Indonesia yang menampilkan Bhineka Tunggal Ika sebagai simbol atas pengakuan pluralitas di Indonesia pada tahun 1945. Dunia baru menggunakan pluralisme budaya pada akhir tahun 1970an; dan menampilkan pluralisme agama pada awal tahun 1980 an.

Istilah multikultural mengandung dua pengertian, yaitu "multi" yang berarti plural (berjenis-jenis) sedangkan "kultural" berarti kultur atau budaya. Pendidikan multikultural berarti pendidikan yang menghargai adanya pluralitas keberagaman budaya. Menurut H.A.R Tilaar, dalam pendidikan multikultural tidak

mengenal fanatisme/fundamentalisme sosial-budaya termasuk agama. Setiap komunitas mengenal dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Demikian pula, pendidikan multikultural tidak mengenal adanya *xenophobia* (kebencian terhadap barang/orang asing). Bahkan, pendidikan multikultural harus bisa mewujudkan peserta didik yang dapat belajar untuk hidup bersama dalam perbedaan (*learning to live together*).

Pendidikan multikultural juga disebut dengan pendidikan multibudaya. Implementasi pendidikan multibudaya dalam pembelajaran bertujuan untuk membantu siswa mengerti, menerima, dan menghargai orang lain yang berbeda suku, budaya, dan nilai kepribadian. Penanaman pendidikan multikultural/ multibudaya bagi siswa dapat menjadi sarana pelatihan dan penyadaran bagi generasi muda untuk menerima perbedaan budaya, agama, ras, etnis, dan kebutuhan di antara sesama dan mau hidup bersama secara damai dan saling menghormati. Pada konteks ini dapat dikatakan, tujuan utama dari pendidikan multikultural adalah untuk menanamkan sikap simpati, respek, apresiasi, dan empati terhadap

penganut agama dan budaya yang berbeda. Lebih jauh lagi, penganut agama dan budaya yang berbeda dapat belajar untuk melawan atau setidaknya tidak setuju dengan ketidak-toleranan (*l'intorelable*) seperti inkuisisi (pengadilan negara atas sah-tidaknya teologi atau ideologi), perang agama, diskriminasi, dan hegemoni budaya di tengah kultur monolitik dan uniformitas global.

Pendidikan multikultural di negara-negara maju menganut konsep demokratis seperti Amerika Serikat. Mereka telah melaksanakan pendidikan multikultural dalam upaya menghilangkan diskriminasi rasial antara etnis kulit putih dan etnis kulit hitam, yang bertujuan memajukan dan memelihara integritas nasional. Terpilihlah Barack Husain Obama menjadi presiden Amerika ke-44 dari etnis kulit hitam merupakan potret keberhasilan Amerika Serikat dalam melaksanakan pendidikan multikultural.

Dalam rangka mencari konsep pendidikan multikultural untuk bangsa ini perlu kita melihat penerapannya di Amerika, dan yang sangat terkenal dengan Tipologi pendidikan multikultural sebagaimana yang dikemukakan oleh

Sleeter dan Grant (1987) juga di dalam buku Thomas J. La Belle and Christopher Ward; demikian juga dikemukakan dalam Banks & Banks. Terdapat lima tipologi pendidikan multikultural yang berkembang:

Pertama, Mengajar mengenai kelompok siswa yang memiliki budaya yang lain (cultur difference). Perubahan ini terutama pada siswa dalam transisi dari berbagai kelompok kebudayaan ke dalam *mainstream* budaya yang ada. *Kedua, Hubungan manusia (human relation).* Program ini membantu siswa dari kelompok-kelompok tertentu sehingga dia dapat mengikuti bersama-sama dengan siswa yang lain dalam kehidupan sosial. *Ketiga, Single group studies.* Program ini mengajarkan mengenai hal-hal yang memajukan pluralisme tetapi tidak menekankan kepada adanya perbedaan stratifikasi sosial yang ada di dalam masyarakat. *Keempat, Pendidikan multikultural.* Program ini merupakan suatu reformasi pendidikan di sekolah-sekolah dengan menyediakan kurikulum serta materi-materi pelajaran yang menekankan kepada adanya perbedaan siswa dalam bahasa, yang keseluruhannya untuk memajukan pluralisme kebudayaan dan ekualitas sosial. *Kelima,*

Pendidikan multikultural yang sifatnya rekonstruksi sosial. Program ini merupakan suatu program baru yang bertujuan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan kultural dan menentang ketimpangan sosial yang ada dalam masyarakat. Program yang kelima ini dapat juga disebut sebagai "*critical multicultural education*".

Menurut penelitian Banks terdapat berbagai dimensi di dalam perkembangan pendidikan multikultural di Amerika: *Pertama*, integrasi pendidikan dalam kurikulum (*content integration*): upaya untuk mengintegrasikan pendidikan multikultural di dalam kurikulum dan di mana atau bagian apa dalam kurikulum integrasi tersebut ditempatkan. Isi kurikulum tersebut antara lain berkaitan dengan masalah bagaimana mengurangi berbagai prasangka di dalam perlakuan dan tingkah laku rasial dari etnis-etnis tertentu dan di dalam materi apa prasangka-prasangka tersebut dapat dikemukakan. Di dalam kaitan ini diperlukan studi mengenai berjenis-jenis kebudayaan dari kelompok-kelompok etnis. Di dalam kaitan *ethnic studies movement* sejak tahun 1960-an di Amerika Serikat. Termasuk di dalam gerakan ini adalah menulis dan mengumpul-kan sejarah dari

masing-masing kelompok etnis yang ada di dalam masyarakat.

Kedua, kontruksi ilmu pengetahuan (*knowledge construction*): di dalam kaitan ini dipelajari mengenai sejarah perkembangan masyarakat Barat dan perlakuannya, serta reaksi dari kelompok etnis lainnya. Sejarah berisi hal-hal yang positif maupun yang negatif yang perlu diketahui oleh peserta didik di dalam upaya mengerti kondisi masyarakatnya dewasa ini.

Ketiga, pengurangan prasangka (*prejudice reduction*): prasangka rasial memang dihidupkan sejak kanak-kanak. Di dalam pergaulan sesamanya mulai ditanamkan prasangka-prasangka yang positif maupun yang negatif terhadap sesamanya. Dengan pergaulan antar kelompok yang intensif, prasangka-prasangka buruk dapat dihilangkan dan dapat dibina kerja sama yang erat dan saling menghargai. Peringatan akan pahlawan-pahlawan, tanpa membedakan warna kulit dan agamanya merupakan cara-cara untuk menanamkan sikap positif terhadap kelompok etnis tertentu. Nilai-nilai tersebut dimasukkan di dalam kurikulum tanpa merubah struktur kurikulum itu sendiri.

Akhirnya pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik ditransformasikan di dalam perbuatan, misalnya di dalam memperingati hari-hari besar dari masing-masing kelompok etnis yang ada di dalam sekolah atau masyarakatnya.

Keempat, pedagogik kesetaraan antarmanusia (*equity pedagogy*): kebudayaan berkaitan dengan kehidupan yang nyata. Kelompok-kelompok etnis yang tersisihkan disebabkan karena sikap yang tidak adil di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan pedagogik yang memperhatikan antara lain kelompok-kelompok masyarakat miskin yang tidak memperoleh kesempatan yang sama dibandingkan dengan kelompok anak-anak dari golongan menengah atau golongan atas. Demikian pula, ternyata ada kaitan antara intelegensi anak dengan kehidupan sosialnya. Anak-anak dari kelompok masyarakat miskin biasanya terhalang perkembangan intelegensinya dan oleh sebab itu, perlu diperhatikan dengan lebih seksama tentang perbaikan sosial ekonomi dari peserta didik yang kebanyakan dari kelompok etnis yang dilupakan.

Kelima, pemberdayaan budaya sekolah (*empowering school culture*): keempat pendekatan tersebut di atas

semuanya bermuara kepada pemberdayaan kebudayaan sekolah. Apabila pendekatan-pendekatan pendidikan multikultural tersebut di atas dapat dilaksanakan maka dengan sendirinya lahir kebudayaan sekolah yang kuat dalam menghadapi masalah-masalah sosial dalam masyarakat. Sekolah haruslah merupakan suatu motor penggerak di dalam perubahan struktur masyarakat yang timpang karena kemiskinan ataupun tersisih di dalam budaya "*mainstream*" masyarakat.

Membangun Pendidikan Multikultural untuk Indonesia

Di Indonesia, salah satu tokoh multikulturalisme adalah Abdurrahman Wahid (*Gus Dur*). Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat memberikan sambutan dalam pemakaman *Gus Dur* di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang bahwa almarhum Abdurrahman Wahid sebagai bapak pluralisme dan multikulturalisme karena jasa beliau dalam melenyapkan diskriminasi dalam beragama maupun etnis dan pembelaan beliau kepada masyarakat minoritas, khususnya di Indonesia.

Menurut Tilaar, untuk

membangun pendidikan multikultural di Indonesia membutuhkan beberapa dimensi sebagai berikut:

Pertama, "*Right to Culture*" dan identitas budaya lokal. Pendidikan multikultural di Indonesia haruslah diarahkan kepada terwujudnya masyarakat madani (*civil society*) di tengah-tengah kekuatan kebudayaan global.

Kedua, kebudayaan Indonesia-yang-menjadi. Kebudayaan Indonesia-yang-menjadi adalah suatu *Weltanschauung* artinya merupakan pegangan setiap insan dan setiap identitas budaya mikro Indonesia. Sebagai suatu *Weltanschauung*, hal tersebut merupakan suatu sistem nilai yang baru (*value system*). Sebagai suatu *value system* yang baru memerlukan suatu proses perwujudannya antara lain melalui proses dalam pendidikan nasional. Oleh sebab itu di tengah-tengah maraknya identitas kesukuan, perlu ditekankan sistem nilai baru yang akan kita wujudkan, yaitu sistem nilai keindonesiaan.

Ketiga, konsep pendidikan multikultural normatif. Tujuan pendidikan multikultural normatif untuk mewujudkan kebudayaan Indonesia yang dimiliki oleh suatu negara-bangsa, tapi jangan sampai

menjadikan konsep pendidikan multikultural normatif sebagai suatu paksaan dengan menghilangkan keanekaragaman budaya-budaya lokal.

Keempat, pendidikan multikultural merupakan suatu rekonstruksi sosial. Salah satu masalah yang timbul akibat berkembangnya rasa kedaerahan, identitas kesukuan, *the right to culture* dari perorangan maupun suatu suku bangsa Indonesia, telah menimbulkan ketidakharmonisan di dalam kehidupan bangsa yang pluralis. Oleh sebab itu, pendidikan multikultural tidak mengenal fanatisme/fundamentalisme sosial-budaya termasuk agama, karena masing-masing komunitas mengenal dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Pendidikan multikultural juga tidak mengenal adanya *xenophobia*.

Kelima, pendidikan multikultural di Indonesia memerlukan pedagogik baru. Karena pedagogik tradisional membatasi proses pendidikan di dalam ruang sekolah yang sarat dengan pendidikan intelektualistik, maka perlu pedagogik baru. Pedagogik yang dibutuhkan ialah: 1) pedagogik pemberdayaan (*pedagogy empowerment*). 2) pedagogik

kesetaraan manusia dalam kebudayaan yang beragam (*pedagogy of equity*).

Pedagogik pemberdayaan pertama-tama berarti, seorang mengenal budayanya sendiri dan selanjutnya kebudayaan itu digunakan untuk mengembangkan budaya Indonesia di dalam negara-bangsa Indonesia. Di dalam upaya tersebut diperlukan pedagogik kesetaraan antar-individu, antar suku, dan tidak membedakan asal-usul suku bangsa dan agamanya.

Keenam, Pendidikan multikultural bertujuan untuk mewujudkan visi Indonesia masa depan serta etika berbangsa. Dalam TAP/MPR RI Tahun 2001 No. VI dan VII mengenai visi Indonesia masa depan serta etika kehidupan berbangsa perlu dijadikan pedoman yang sangat berharga dalam mengembangkan konsep pendidikan multikultural. Dalam kaitan ini perlu dipertimbangkan menghidupkan kembali pendidikan budi pekerti terutama di tingkat pendidikan dasar, melengkapi pendidikan agama yang sudah ditangani dengan UU No. 20 Tahun 2003.

Keenam dimensi di atas dalam upaya membangun pendidikan multikultural di Indonesia. Indonesia

sebagai negara yang plural terdiri dari pelbagai suku dan agama membutuhkan sebuah konsep pendidikan multikultural yang dapat menghasilkan peserta didik yang dapat menghargai perbedaan dan hidup dalam keharmonisan perbedaan.

Ada beberapa pendekatan dalam proses pendidikan multikultural, yaitu: *Pertama*, tidak lagi terbatas pada menyamakan pandangan pendidikan (*education*) dengan persekolahan (*schooling*) atau pendidikan multikultural dengan program-program sekolah formal. Pandangan yang lebih luas mengenai pendidikan sebagai transmisi kebudayaan membebaskan pendidik dari asumsi bahwa tanggung jawab primer mengembangkan kompetensi kebudayaan di kalangan anak didik semata-mata berada di tangan mereka dan justru semakin banyak pihak yang bertanggung jawab karena program-program sekolah seharusnya terkait dengan pembelajaran informal di luar sekolah.

Kedua, menghindari pandangan yang menyamakan kebudayaan dengan kelompok etnik adalah sama. Artinya, tidak perlu lagi mengasosiasikan kebudayaan semata-

mata dengan kelompok-kelompok etnik sebagaimana yang terjadi selama ini. secara tradisional, para pendidik mengasosiasikan kebudayaan hanya dengan kelompok-kelompok sosial yang relatif *self sufficient*, ketimbang dengan sejumlah orang yang secara terus menerus dan berulang-ulang terlibat satu sama lain dalam satu atau lebih kegiatan. Dalam konteks pendidikan multikultural, pendekatan ini diharapkan dapat mengilhami para penyusun program-program pendidikan multikultural untuk melenyapkan kecenderungan memandang anak didik secara *stereotip* menurut identitas etnik mereka dan akan meningkatkan eksplorasi pemahaman yang lebih besar mengenai kesamaan dan perbedaan di kalangan anak didik dari berbagai kelompok etnik.

Ketiga, karena pengembangan kompetensi dalam suatu "kebudayaan baru" biasanya membutuhkan interaksi inisiatif dengan orang-orang yang sudah memiliki kompetensi, bahkan dapat dilihat lebih jelas bahwa upaya-upaya untuk mendukung sekolah-sekolah yang terpisah secara etnik adalah antitesis terhadap tujuan pendidikan multikultural. Mempertahankan dan

memperluas solidaritas kelompok adalah menghambat sosialisasi ke dalam kebudayaan baru. Pendidikan bagi pluralisme budaya dan pendidikan multikultural tidak dapat disamakan secara logis.

Keempat, pendidikan multikultural meningkatkan kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Kebudayaan mana yang akan diadopsi ditentukan oleh situasi. *Kelima*, kemungkinan bahwa pendidikan (baik dalam maupun luar sekolah) meningkatkan kesadaran tentang kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Kesadaran seperti ini kemudian akan menjauhkan kita dari konsep dwi budaya atau dikotomi antara pribumi dan non-pribumi. Dikotomi semacam ini bersifat membatasi individu untuk sepenuhnya mengekspresikan diversitas kebudayaan. Pendekatan ini meningkatkan kesadaran akan multikulturalisme sebagai pengalaman normal manusia. Kesadaran ini mengandung makna bahwa pendidikan multikultural berpotensi untuk menghindari dikotomi dan mengembangkan apresiasi yang lebih baik melalui kompetensi kebudayaan yang ada pada diri anak didik.

Nilai-nilai kebudayaan pada

dasarnya sudah menjadi kebijakan dalam merumuskan bentuk pendidikan nasional. Sebagaimana dalam UU Sisdiknas 2003 Pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa pendidikan nasional adalah *Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.*

Jadi, menurut UU Sisdiknas 2003 di atas, agama dan kebudayaan nasional merupakan sumber nilai pendidikan nasional. Pelaksanaan pendidikan nasional tak boleh keluar dari nilai agama maupun kebudayaan bangsa Indonesia. walaupun secara tegas dinyatakan bahwa Indonesia bukan Negara agama dan bukan pula Negara sekuler, tetapi Negara Pancasila. Menurut Bahtiar Effendi – sebagaimana dikutip oleh Abdur Rahman Assegaf, dkk- sebagai Negara Pancasila, dapat dikatakan bahwa Indonesia mengambil jalan tengah (*middle path*) antara Negara agama dan Negara sekuler. Rumusan sila pertama Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945 Ayat (1) memberikan sifat yang khas pada Negara Indonesia, bukan Negara sekuler yang memisahkan agama dan Negara, dan bukan

Negara agama yang berdasarkan pada agama tertentu. Negara Pancasila menjamin kebebasan setiap warga negaranya untuk beragama dan wajib memelihara budi pekerti luhur berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Rumusan pendidikan multikultural ini merupakan upaya untuk mewujudkan bentuk pendidikan multikultural di Indonesia. Indonesia sebagai bangsa yang memiliki potensi secara kultural, tradisi, dan lingkungan geografi serta demografis sangat luar biasa, maka perlu ditumbuhkembangkan pendidikan multikultural sebagai salah satu solusi persoalan akibat dampak arus globalisasi, konflik horisontal karena fanatisme sosial-budaya termasuk agama.

Pendidikan Multikultural-Religius

Istilah pendidikan multikultural-religius mengandung dua konsep pendidikan yang dipadukan, yaitu antara pendidikan multikultural dan pendidikan agama. Pendidikan multikultural sebagai basis pendidikan yang menghargai kemajemukan budaya sedangkan pendidikan agama sebagai basis pendidikan yang bersumberkan pada nilai-nilai keagamaan untuk melahirkan manusia-manusia religius. Perpaduan

dua konsep pendidikan ini bertujuan untuk dapat membangun sistem pendidikan yang dapat mengintegrasikan dari keduanya atau mengurangi kelemahannya.

Dalam pendidikan multikultural, sikap penghargaan akan keberagaman dan perbedaan sangat ditekankan. Dalam hal ini, keberagaman (pluralitas) dan perbedaan dipandang sebagai *sunnatullah* yang niscaya terjadi. Peserta didik harus ditanamkan sikap saling menghargai sedini mungkin untuk meminimalisir munculnya konflik dan pandangan subjektif terhadap keberagaman dan perbedaan di masa yang akan datang.

Dalam pendidikan agama, sikap ketaatan kepada Allah sangat ditekankan. Pendidikan agama untuk membentuk pribadi muslim yang religius. Pribadi muslim merupakan sebuah proses ketundukkan seseorang terhadap seluruh perintah Allah. Dalam al-Qur'an, Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk memasuki Islam secara *kaffah*/keseluruhan. Sebagaimana Firman Allah dalam Surah al-Baqarah [2]: 208:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَدْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَافَّةً

وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ



"Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu."

Ayat ini menegaskan kepada umat Islam untuk beragama Islam secara keseluruhan (*Islam Kaffah*). *Islam Kaffah* mengandung arti sebagai ketundukan total terhadap semua perintah Allah yang dirumuskan di dalam Al-Qur'an dan al-Hadis. Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum utama Islam yang mengatur segala urusan kehidupan manusia di dunia. Berdasarkan hal ini, maka pendidikan agama harus bisa mewujudkan peserta didik menjadi muslim sempurna (*kaffah*). Pertama, ayat *Qur'aniah (Qauliah)*, aturan-aturan yang terangkum dalam Al-Qur'an dan al-Hadis. Dalam kepatuhan pada ayat *Qur'aniah*, hukum yang terpenting adalah tauhid (keesaan Allah), akhlak (moralitas), dan keadilan (hukum kepasangan positif dan negatif atau *maslahat* dan *mafsadat*). Fungsi terbesar syahadat "*Tiada Tuhan selain Allah*" adalah

sebagai kunci keselamatan ketika menyeberangi kehidupan dunia menuju akhirat, sedangkan syirik sebagai satu-satunya dosa yang tidak dapat diampuni Allah, kecuali dengan *taubat nasuha* (benar-benar tobat). Orang yang tunduk kepada ayat *Qur'aniah* disebut *muslim teologis*.

Kedua, ayat *Kauniah*, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di Jagat raya (*kosmos*). Tanda kebesaran Allah yang terpenting di sini adalah hukum kepasangan yang dititipkan Allah pada setiap benda alamiah. *Sunnatullah* atau takdir Allah (hukum alam) ini memegang peran kunci dalam menentukan keselamatan atau kedamaian di dunia. *Islami* pada tingkat alam adalah menyeimbangkan potensi negatif dan potensi positif setiap benda. *Islami* di sini ditarik sampai pada titik memaksimalkan potensi positif dan meminimalkan potensi negatif suatu benda.

Hukum alam ini berlaku bagi siapa saja tanpa mengenal batas-batas kemanusiaan apapun, seperti: ras, agama, dan status sosial. Pada tingkat alam inilah semua agama sama, karena siapa pun yang melanggar hukum kepasangan ini pasti dihukum Allah seketika. Sebaliknya, siapapun yang taat (tunduk pada hukum kepasangan ini),

pasti diberi pahala oleh Allah, yaitu keselamatan di dunia. Misalnya, jika ada seorang Islam, Yahudi, Kristen, Budha, atau Hindu menyeberangi Laut Selatan dengan berenang (tanpa alat renang), pasti dia akan dihukum oleh Allah. Dia akan tenggelam dan mati. Sebaliknya, jika ada orang Komunis (Ateis) menyeberangi Laut Selatan dengan kapal, maka dia akan selamat sampai tujuan. Karena pada hakikatnya, si Komunis adalah *muslim alamiah*, sebab dia beriman kepada hukum kepasangan sebagai hukum terbesar yang "mengatur" kehidupan *kosmos*, sehingga dia mencapai keamanan (seakar dengan iman). Keselamatan dan kedamaian atau keamanan di sini hanya pada tingkat *kosmos* atau duniawi. Untuk menyeberangi akhirat dibutuhkan kunci: *Tauhid*.

Ketiga, ayat *Insaniah*, tanda-tanda kebesaran atau hukum-hukum Allah yang mengatur kehidupan manusia (*kosmis*). Hukum yang terpenting di sini ialah hukum kepasangan. Islam dan Iman (sehingga selamat dan aman) pada tingkat ini adalah menyeimbangkan potensi positif dan negatif, yaitu menciptakan keseimbangan atau keadilan sosial. Allah sudah mendelegasikan hukum

keseimbangan ini kepada mausia seperti tercermin dalam hadis "*Kerelaan Allah tergantung pada kerelaan manusia (orang tua)*". Hukum ini diperkuat dengan prinsip *mutual agreement*.

Kesalahan sosial harus terlebih dahulu diselesaikan antara pihak-pihak terkait. Jika terkait belum memaafkan, Allah juga belum mengampuni. Orang yang mentaati hukum *insaniah* disebut *muslim insaniah*.

Ketundukkan terhadap tiga ayat di atas melahirkan seorang muslim *kaffah*. Seorang muslim yang taat hukum-hukum Allah yang dipresentasikan dalam Al-Qur'an dan al-Hadis, hukum kosmos, dan hukum kosmis. Manusia religius harus mempresentasikan ketiga ketundukkan ini. Konsep ini jika diimplementasikan dalam pendidikan agama (Islam) berarti pendidikan agama harus mengajarkan pada peserta didik untuk memahami dan mengamalkan ayat *qur'aniah*, *kauniah*, dan *insaniah* agar menjadi muslim *kaffah*.

Pendidikan Multikultural-Religius untuk Mewujudkan Karakter Peserta Didik yang Humanis-Religius.

Era Globalisasi akan banyak menimbulkan pelbagai persoalan, misalnya bebasnya kontak budaya lokal dengan budaya asing tanpa batas, tercabutnya nilai-nilai moral-spiritual, persaingan bebas antar bangsa, dan kemajuan teknologi tanpa diimbangi sikap moral, dan sebagainya. Semua orang pada zaman ini dituntut memiliki sikap cerdas dalam memilah dan memilih dampak globalisasi. Pendidikan sebagai basis pembentuk perilaku, proses pembudayaan, dan penanaman nilai diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif tentang sisi positif dan sisi negatif arus globalisasi.

Bagaimanakah peran pendidikan multikultural-religius dalam menyikapi persoalan di atas? Konsep pendidikan multikultural-religius sebagai bentuk pendidikan yang menekankan pada pembudayaan sikap saling menghargai keberagaman atau keanekaragaman budaya, ras, suku, agama dan sikap kepatuhan terhadap perintah Allah akan dapat mewujudkan nilai-nilai moral-spiritual, seperti: *humanis-religius*.

Humanis-religius adalah sikap yang mengedepankan sisi-sisi kemanusiaan dan nilai-nilai keagamaan. Sikap *humanis* mengedepankan sikap memanusiakan manusia dalam konteks menghadapi perbedaan dalam keberagaman, sedangkan sikap religius sebagai benteng terhadap persoalan dekadensi moral-spiritual akibat dampak negatif globalisasi. Oleh karena itu, konsep pendidikan multikultural-religius merupakan upaya dalam membentuk karakter generasi yang berbudaya luhur dan religius sehingga selamat di dunia dan akhirat.

Dalam penerapannya di lembaga pendidikan, pendidikan multikultural-religius dapat meminimalisir terjadinya pertikaian, perpecahan, maupun peperangan antar agama, ras, suku, maupun bangsa. Contoh praktik penerapannya sebagai berikut: 1). Peserta didik dikenalkan perbedaan budaya, agama, ras, suku, dan bangsa lain. Perbedaan ini sudah *sunnatullah* agar manusia dapat saling mengenal dan saling menghargai. 2). Peserta didik

ditanamkan prasangka-prasangka positif terhadap perbedaan agama, ras, suku, maupun bangsa dan menghindarkan diri dari prasangka-prasangka negatif. 3). Peserta didik ditanamkan sikap simpati, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama, budaya, ras, suku, maupun bangsa yang berbeda. 4). Peserta didik ditanamkan sikap positif dan saling menghargai perbedaan itu.

Penutup

Pendidikan sebagai basis nilai moral-spiritual harus dapat menjadi solusi terhadap munculnya dampak globalisasi. Konsep pendidikan multikultural-religius merupakan perpaduan antara konsep pendidikan multikultural yang menekankan sikap penghargaan terhadap keberagaman dengan konsep pendidikan agama yang menekankan sikap tunduk dan patuh terhadap semua perintah Allah. Perpaduan konsep ini diharapkan dapat memunculkan bentuk pendidikan yang dapat melahirkan manusia-manusia yang *humanis* dan *religius*.

DAFTAR PUSTAKA

Effendi, Bahtiar, *Masyarakat, Agama, dan Pluralisme Keagamaan*, Yogyakarta: Galang Press, 2002.

H.A.R, Tilaar, *Multikulturalisme Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, Jakarta: PT Grasindo, 2004.

Idi, Abdullah dan Suharto, Toto, *Revitalisasi Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.

Muhajir, Noeng, *Filsafat dan Teori Pendidikan*, buku Diklat dalam perkuliahan Filsafat Pendidikan Islam, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2009.

Rahman Assegaf, Abdur dkk. *Pendidikan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Suka Press, 2007.

Supriyoko, Ki (ed.) *Pendidikan Multikultural dan Revitalisasi Hukum Adat, dalam Perspektif Sejarah*, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala Tahun Terbit : Juli 2005